

## KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF

JOHN RAWLS

### INTISARI

Indonesia memiliki jumlah koperasi terbanyak di dunia yakni 212.135, akan tetapi koperasi yang aktif melaksanakan rapat anggota hanya 58.107 (27, 39%) (Sumber: Depkop 2015). Padahal rapat anggota adalah perangkat organisasi terpenting koperasi. Kondisi perkoperasian di Indonesia semakin diperburuk dengan mencuatnya investasi bodong berkedok koperasi dan banyaknya koperasi yang tinggal papan nama. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF JOHN RAWLS** ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan koperasi sebagai badan usaha dalam tataran ideologis.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sistematis reflektif, dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan utama yang digunakan adalah *International Cooperative Identity Statement* yang dikeluarkan oleh International Cooperative Alliance. Sumber utama lainnya adalah Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 tentang Perkoperasian yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, deskripsi, koherensi internal, interpretasi, dan refleksi filosofis.

Dalam pembahasan filsafat dikenal adanya keadilan distributif John Rawls. Keadilan distributif John Rawls digunakan untuk melihat skema pembagian keadilan distribusi pada perangkat organisasi koperasi sebagai institusi yang dilindungi oleh Undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah teori keadilan distributif John Rawls dapat ditemui dalam skema pembagian keadilan pada perangkat organisasi koperasi.

Kata kunci: Keadilan Distributif John Rawls, Koperasi, dan *International Cooperative Identity Statement*.

## INDONESIAN COOPERATIVE IN JOHN RAWLS' JUSTICE DISTRIBUTIVE

### PERSPECTIVE

#### ABSTRACT

Indonesia has 212.135 cooperatives that makes Indonesia a country with the highest number of cooperatives in the world, but unfortunately cooperatives that conducts annual general assembly actively is only 58.107 (27.39%) (Source: Depkop 2015). Whereas an annual general assembly plays role as the most important instrument in the cooperative organization. This condition is exacerbated by the escalation of bulging investment disguised as cooperatives and cooperative that no longer works that substantially. Therefore, this study entitled **Indonesian Cooperative In John Rawls' Justice Distributive Perspective** was created in order to determine the feasibility of the cooperative as a business entity in the ideological level.

This research can be categorized as reflective of systematic research with collecting various sources of relevant literature. The main literature sources used is *International Cooperative Identity Statement* issued by the International Cooperative Alliance. Other supporting Sources are Law on Cooperatives No. 25 issued by the Ministry of Cooperatives and SMEs. Methods used include: interpretation, descriptions, internal coherence, interpretation, and philosophical reflection.

During philosophical investigation there is distributive justice John Rawls. Furthermore, distributive justice of John Rawls is used to apprehend the distribution of equity sharing scheme in the cooperative organization instrument as an institution that is protected by law. Results obtained from this study is the correlation between some of the principles of cooperatives with the principles of business ethics. John Rawls theory of distributive justice can be found in the equity sharing scheme on the cooperative organization instrument.

Keyword : Distributive Justice of John Rawls, Cooperative, and *International Cooperative Identity Statement*,.